KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juni 2021

Nomor	:	910/1297/IJ
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Triwulan II 2021

Yth 1. Gubernur
2. Bupati dan Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan memperhatikan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-448/D3/01/2021 tanggal 9 Juni 2021 hal Kerja Sama BPKP dan APIP dalam Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah Triwulan II Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Akan dilaksanakan kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2021, dengan ruang lingkup:
   a. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
   b. Realisasi pendapatan;
   c. Realisasi belanja; dan
   d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui proses tender/pelelangan.
2. Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dilaksankan secara kolaboratif antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai pada tanggal 17 Juni 2021.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan bantuan Saudara:
   a. Memerintahkan Inspektur Daerah untuk berperan aktif dalam pelakanaan evaluasi dimaksud dan berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP setempat.
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2021 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui email: bagrenitjendagri@supermail.id.
4. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan evaluasi dimaksud dapat menghubungi Sdr Rivai Seknun HP 085343000096.

Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,

Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan